

Glokalisasi dalam Implementasi Kebijakan *Feminist International Assistance Policy* (FIAP) Kanada

Eunike Angelita¹, Megahnanda Alidyan Kresnawati²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, eunangel11@gmail.com,
megahnanda.hi@upnjatim.ac.id

Dikirim 26 Januari 2023, disetujui 1 April 2023, diterbitkan 2 April 2023

Pengutipan: Angelita, E & Kresnawati, M.A. (2023). Glokalisasi dalam implementasi kebijakan *feminist international assistance policy* (FIAP) Kanada, 14(1), 251-263

Abstrak

Penelitian ini secara garis besar menyoroti fenomena glokalisasi dalam implementasi kebijakan *Feminist International Assistance Policy* (FIAP). Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang menggunakan metode pengumpulan data sekunder dan memiliki tujuan utama untuk meninjau, mendalami, serta menganalisa penerapan fenomena glokalisasi dalam pengimplementasian kebijakan *Feminist International Assistance Policy* (FIAP) dengan meninjau kedua sisi, yaitu sisi global dan sisi lokal kebijakan *Feminist International Assistance Policy* (FIAP). Tujuan tambahan penelitian ini adalah; (1) Untuk memahami definisi umum dan penerapan pendekatan-pendekatan feminisme dalam praktik penerapan kebijakan *Feminist International Assistance Policy* (FIAP), (2) Menganalisa kontribusi kebijakan *Feminist International Assistance Policy* (FIAP) terhadap pencapaian Proyek Pembangunan Berkelanjutan PBB, dan (3) Menambah wawasan pembaca mengenai kebijakan *Feminist International Assistance Policy* (FIAP), serta kajian-kajian glokalisasi, gender, feminisme, dan Proyek Pembangunan Berkelanjutan PBB dalam studi Hubungan Internasional. Hasil penelitian ini menemukan sisi global kebijakan *Feminist International Assistance Policy* (FIAP) tercermin dari tertuangnya nilai-nilai feminisme dan prinsip 3R (*Women's Rights, Resources, and Representation*) milik kebijakan luar negeri feminis Swedia dalam implementasi setiap area-area aksi kebijakan *Feminist International Assistance Policy* (FIAP). Penelitian ini juga mengemukakan bahwa sisi lokal kebijakan *Feminist International Assistance Policy* (FIAP) dapat diamati dari; (1) Fokus kebijakan *Feminist International Assistance Policy* (FIAP) yang hanya menekankan pada bidang bantuan internasional dan bersifat transformatif, (2) Aspek lingkungan dalam kebijakan *Feminist International Assistance Policy* (FIAP) yang tercermin dari adanya area aksi keempat, yaitu aksi lingkungan dan iklim, dan (3) Setiap area aksi kebijakan *Feminist International Assistance Policy* (FIAP) secara spesifik berusaha untuk mencapai target-target Proyek Pembangunan Berkelanjutan PBB (*The Sustainable Development Goals/SDGs*).

Kata Kunci: *Feminist International Assistance Policy*, Kanada, Glokalisasi, Feminisme, Perempuan

Abstract

This research outlines the globalization phenomenon in the implementation of the *Feminist International Assistance Policy* (FIAP). This research is a descriptive research that uses secondary data collection methods and has the main objective of reviewing, exploring, and analyzing the application of the globalization in the implementation of the *Feminist International Assistance Policy* (FIAP) policy by showing two sides, the global side and the local side of the *Feminist International Assistance Policy* (FIAP). The additional objectives of this research are; (1) To understand the general definition and application of feminism approaches in the practice of the *Feminist International Assistance Policy* (FIAP), (2) To analyze the contribution of the *Feminist International Assistance Policy* (FIAP) to the achievement of The United Nations Sustainable Development Project goals, and (3) To broaden the knowledge of the readers on the *Feminist International Assistance Policy* (FIAP), as well as the studies on globalization, gender, and feminism, and the United Nations Sustainable Development Project in the study of International Relations. The results of this study found that the global side of the *Feminist International Assistance Policy* (FIAP)

reflected in the application of feminism values and principles and the 3R principles (Rights, Resources, and Women's Representation) of the Swedish feminist foreign policy in the implementation of every action area in the Feminist International Assistance Policy (FIAP). This research also reveals that the local side of the Feminist International Assistance Policy (FIAP) can be viewed from; (1) The focus of the Feminist International Assistance Policy (FIAP) which only focuses on the field of international aid and is transformative in nature, (2) The environmental aspect in the Feminist International Assistance Policy (FIAP) reflected on the fourth area of action, called environment and climate action, and (3) Each of the Feminist International Assistance Policy (FIAP) policy action areas specifically aims to achieve the targets of the UN Sustainable Development Project (The Sustainable Development Goals/SDGs).

Keywords: Feminist International Assistance Policy, Canada, Glocalization, Feminism, Women

1. Pendahuluan

Definisi umum dari kebijakan bantuan internasional feminis atau bisa disebut *Feminist International Assistance Policy* (FIAP) adalah kerangka kerja politik bagi Kanada dalam berinteraksi dan menjalin hubungannya dengan negara lain. Secara luas, perancangan kebijakan tersebut bertujuan untuk untuk memajukan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta anak. Kanada mengadopsi kebijakan ini pada 9 Juni 2017, dibawah kepemimpinan Perdana Menteri Justin Trudeau. Kanada percaya bahwa pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam kebijakan ini dapat secara efektif mengurangi kemiskinan, serta menciptakan dunia yang lebih inklusif, damai dan sejahtera (Organization).

Pengimplementasian kebijakan *Feminist International Assistance Policy* (FIAP), Kanada menggunakan pendekatan-pendekatan feminisme (Organization). Feminisme memiliki sifat interdisipliner karena berfokus pada isu-isu gender, jenis kelamin, dan seksualitas (Day, 2016), bertujuan untuk menuntut keadilan bagi perempuan (McAfee & Noëlle, 2018), serta berusaha untuk mengakhiri ketidaksetaraan yang berbasis kemampuan, kelas, gender, ras, jenis kelamin, dan seksualitas (Day, 2016). Kebijakan *Feminist International Assistance Policy* (FIAP) bersifat multidisipliner karena terinspirasi dari sifat feminisme yang juga berfokus pada banyak bidang. Maka dari itu, Kebijakan *Feminist International Assistance Policy* (FIAP) yang dimiliki oleh Kanada berfokus pada enam area aksi utama (*action areas*), antara lain; (1) Kesetaraan gender, dan pemberdayaan wanita, (2) Martabat manusia, (3) Pertumbuhan bagi semua orang, (4) Lingkungan dan aksi iklim, (5) Pemerintahan inklusif, serta (6) Perdamaian dan keamanan (Canada).

Secara teori dan dalam penerapannya, terdapat fenomena glocalisasi dalam pelaksanaan dan perancangan kebijakan *Feminist International Assistance Policy* (FIAP). Glocalisasi berarti gabungan dari fenomena lokalisasi dan globalisasi (Khondker, 2005). Glocalisasi dapat terjadi dalam berbagai aspek kehidupan (Nurhayati). Maka dari itu, dalam bidang politik, glocalisasi dapat diartikan sebagai percampuran unsur-unsur dan kepentingan politik global dan lokal. Eksistensi glocalisasi dalam implementasi kebijakan *Feminist International Assistance Policy* (FIAP) disebabkan oleh Kanada yang terinspirasi dari peluncuran kebijakan luar negeri feminis pertama kali didunia milik Swedia di tahun 2014 (Morton, Muchiri, dan Swiss, 2020). Oleh karena itu, Swedia dijuluki sebagai negara pelopor pembentuk kebijakan luar negeri feminis pertama di duna (*the mother of feminist foreign policy*) (Women, 2021).

Fenomena glocalisasi dalam implementasi kebijakan *Feminist International Assistance Policy* (FIAP) juga dapat tercermin dalam hal-hal lainnya. Yang pertama, tidak seperti Swedia yang menerapkan secara penuh kebijakan luar negeri feminisnya dalam

seluruh bidang, Kanada hanya menerapkan komitmen feminis dalam kebijakan luar negerinya di bidang bantuan internasional (Morton, Muchiri, dan Swiss, 2020). Yang kedua, dalam enam area utama kebijakan *Feminist International Assistance Policy* (FIAP) Kanada terkandung prinsip 3R (*Rights, Resources, and Representation*) yang dimiliki oleh rancangan *blueprint* kebijakan luar negeri feminis milik Swedia (ICRW, 2021). Prinsip pendekatan 3R menuntut; Hak perempuan (*Women's Rights*), yang didukung dengan sumber daya (*Resources*), demi meningkatkan tingkat perwakilan perempuan (*Women's Representation*) (ICRW, 2021). Yang ketiga, setelah melalui proses lokalisasi, Kanada mengembangkan kebijakannya dengan mencantumkan aspek lingkungan yang tertuang dalam area aksi ketiga, yaitu pertumbuhan bagi semua orang yang menargetkan beberapa bidang lingkungan seperti pertanian berkelanjutan (*sustainable agriculture*), teknologi hijau, dan energi terbarukan, serta area aksi keempat, yaitu lingkungan dan iklim yang berfokus pada adaptasi, mitigasi, serta pengelolaan air (Canada). Yang keempat, jika dibandingkan dengan kebijakan luar negeri feminis Swedia, kebijakan *Feminist International Assistance Policy* (FIAP) Kanada jauh lebih tidak disruptif karena lebih berfokus kepada transformasi norma (Global Affairs Canada, 2017).

Sisi lokal dari kebijakan *Feminist International Assistance Policy* (FIAP) juga dapat terlihat dari fokus tujuan kebijakan *Feminist International Assistance Policy* (FIAP) dan pemerintah Kanada yang ingin memajukan seluruh bidang target pencapaian Proyek Pembangunan Berkelanjutan PBB (*The United Nations Sustainable Development Goals*) (Women, 2021). Terbukti dalam setiap area aksi dalam kebijakan *Feminist International Assistance Policy* (FIAP) yang selalu memiliki setidaknya satu target atau lebih (*goals*) yang ingin dicapai dari Proyek Pembangunan Berkelanjutan PBB. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam penerapannya, terdapat unsur glokalisasi dalam kebijakan *Feminist International Assistance Policy* (FIAP).

2. Metode Penelitian

Penelitian ini memanfaatkan metode deskriptif. Berdasarkan definisinya, penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang berusaha untuk menganalisa dan mendeskripsikan suatu fenomena atau keadaan atau kondisi yang hasilnya dielaborasi dalam bentuk laporan penelitian. Penelitian ini tergolong sebagai penelitian deskriptif karena bertujuan untuk menganalisa dan mendeskripsikan fenomena glokalisasi dalam implementasi kebijakan *Feminist International Assistance Policy* (FIAP) Kanada.

Langkah-langkah penelitian ini selaras dengan langkah-langkah penelitian deskriptif yang benar yang dinyatakan oleh Sukardi, antara lain; (1) Mengidentifikasi hadirnya sebuah permasalahan penting untuk diteliti, (2) Merumuskan permasalahan dengan jelas, (3) Menentukan manfaat dan tujuan penelitian, (4) Melakukan kegiatan studi pustaka mengenai permasalahan yang dibahas, (5) Membuat kerangka berpikir, pertanyaan penelitian, serta hipotesis penelitian, (6) Menetapkan metode penelitian, (7) Mengumpulkan, mengurutkan, dan menganalisis data, dan (8) Membuat laporan penelitian (Sukardi, 2003: 158-159).

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data secara sekunder. Hal tersebut disebabkan karena data sekunder yang digunakan bersumber dari kumpulan data primer yang diambil secara langsung lewat praktik lapangan, kemudian disimpulkan oleh peneliti untuk dibaca oleh pembaca, sehingga dapat dikatakan penelitian ini bersifat sekunder. Penelitian ini juga merupakan penelitian sosial dan bersifat teoritis sehingga pengumpulan data sekunder adalah metode yang paling tepat untuk mendukung kesuksesan penelitian. Data sekunder yang akan dimanfaatkan dan digunakan dalam penelitian diambil dari

penelitian dan survei yang telah ada sebelumnya, laporan organisasi, publikasi akademis dan formal, dokumen sejarah, jurnal, buku, situs resmi, berita, dan lainnya. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sisi Global dari Kebijakan *Feminist International Assistance Policy* (FIAP)

A. Feminisme

Feminisme adalah nilai global yang tertuang dalam kebijakan *Feminist International Assistance Policy* (FIAP). Feminisme sendiri adalah suatu fenomena global sebab aktivisme feminis telah mengglobal. Feminis global berpendapat bahwa patriarki bersifat universal karena perempuan di seluruh dunia pasti pernah merasakan penindasan gender (Parekh dan Wilcox, 2020). Feminisme telah membentuk kebijakan luar negeri feminis pertama kali di dunia yang diluncurkan oleh Swedia di tahun 2014 (Morton, Muchiri, dan Swiss, 2020). Dalam perkembangannya, feminisme dan kebijakan luar negeri feminis Swedia juga telah menjadi fondasi banyak negara lainnya untuk mengadopsi kebijakan luar negeri yang feminis, salah satu contohnya adalah Kanada dengan kebijakan *Feminist International Assistance Policy* (FIAP).

Dalam sejarahnya, kebijakan luar negeri feminis telah diadopsi oleh beberapa negara di dunia yang kebanyakan adalah negara-negara barat. Pada tahun 2014, Swedia adalah negara pertama di dunia yang mengadopsi kebijakan luar negeri feminis (Women, 2022). Disusul dengan peresmian implementasi kebijakan luar negeri feminis Kanada yang bernama *Feminist International Assistance Policy* (FIAP) pada tahun 2017, Prancis pada tahun 2019, Meksiko pada tahun 2020, Spanyol, Luksemburg, dan Jerman pada tahun 2021, serta Chili pada tahun 2022 (Women, 2022). Beberapa negara lainnya meskipun belum mutlak mengadopsi kebijakan luar negeri feminis sepenuhnya, namun telah menggunakan pendekatan feminisme dan prinsip-prinsip kebijakan luar negeri feminis dalam merancang keputusan-keputusan politik, seperti; (1) Di Britania Raya, pada tahun 2016 di London didirikan Pusat Kebijakan Luar Negeri Feminis atau *Center for Feminist Foreign Policy* (CFFP), serta tiga kubu partai politik di Britania Raya berjanji akan mengadopsi kebijakan luar negeri feminis jika mereka menang dan menjabat, yaitu Partai Buruh dan Partai Kesetaraan Wanita (2018), dan Partai Nasional Skotlandia (2021) (Policy), (2) Di Amerika Serikat, resolusi dukungan terhadap implementasi kebijakan luar negeri feminis telah diajukan pada tahun 2020 (Women, 2022), (3) Hawaii meluncurkan Rencana Pemulihan Ekonomi Feminis pada tahun 2020 (Policy), (4) Pada tahun 2021, menteri luar negeri wanita pertama Libya mendeklarasikan niatnya untuk mengimplementasi kebijakan luar negeri feminis di Forum Kesetaraan Generasi pada tahun 2021, namun belum ada langkah atau tindak lanjut nyata seperti pembentukan kelembagaan atau komitmen apapun (Women, 2022), (5) Belanda dan Belgia sampai sekarang masih dalam tahap pengembangan perspektif implementasi kebijakan luar negeri feminis mereka masing-masing (Women, 2022), dan (6) Jepang sebagai negara di Asia pertama yang meluncurkan kebijakan luar negeri “Perempuan Bersinar” atau *Women Shine Foreign Policy* di bawah pemerintahan Shinzo Abe pada tahun 2013 hingga 2020 (Motoyama, 2022).

Gambar 1

Bagan Linimasa Sejarah Perkembangan Kebijakan Luar Negeri Feminis



Nilai-nilai feminisme yang tertuang dalam kebijakan *Feminist International Assistance Policy* (FIAP) tercermin dari tujuan utama kebijakan *Feminist International Assistance Policy* (FIAP) untuk mengurangi kemiskinan, demi menciptakan dunia yang lebih inklusif, damai dan sejahtera (Organization). Inklusivitas merupakan elemen dari feminisme sebab feminisme berusaha untuk mengakhiri ketidaksetaraan yang berbasis kemampuan, kelas, gender, ras, jenis kelamin, dan seksualitas, serta menghapuskan penindasan terhadap kaum minoritas (Day, 2016). Menganalisa dari enam area aksi (*action areas*) kebijakan *Feminist International Assistance Policy* (FIAP) yang antara lain sebagai berikut; (1) Kesetaraan gender, dan pemberdayaan wanita, (2) Martabat manusia, (3) Pertumbuhan bagi semua orang, (4) Lingkungan dan aksi iklim, (5) Pemerintahan inklusif, (6) Perdamaian dan keamanan (Canada), seluruh poin-poin tersebut selaras dengan prinsip-prinsip feminisme.

Yang pertama, feminisme secara keras menentang pelanggaran hak asasi manusia, dan penindasan terhadap kaum minoritas (Day, 2016) yang selaras dengan intisari dan tujuan area aksi pertama, dan kedua (Canada G. A., 2017). Pada area aksi ketiga yang menekankan pada pertumbuhan bagi semua orang (Canada G. A., 2017), membutuhkan adanya inklusivitas, sebab tanpa adanya inklusivitas, pertumbuhan tidak akan merata. Begitupun juga dengan area aksi kelima yang berfokus pada pemerintahan yang inklusif (Canada G. A., 2017). Maka dari itu, area aksi ketiga dan kelima sejalan dengan prinsip inklusivitas yang ingin dicapai oleh feminisme (Day, 2016). Pada area aksi keempat, yaitu lingkungan dan aksi iklim, kebijakan *Feminist International Assistance Policy* (FIAP) berusaha secara tidak langsung untuk meringankan beban perempuan lewat pelestarian lingkungan dan aksi iklim. Faktanya, perempuan dan anak perempuan seringkali menjadi produsen utama dalam memasak makanan dan menyediakan air, pemanas, dan bahan bakar memasak dalam rumah tangga (Canada G. A., 2017). Maka dari itu, sangatlah penting untuk mengatasi permasalahan air, yang termasuk akses berkelanjutan terhadap air bersih, sanitasi yang memadai dan layak, serta pengelolaan sumber daya air terpadu (Canada G. A., 2017).

Kebijakan *Feminist International Assistance Policy* (FIAP) berupaya untuk memberikan akses yang lebih baik terhadap sumber daya dan teknologi tahan iklim kepada perempuan dan anak perempuan, agar mereka dapat menggunakan lebih banyak waktu mereka di bidang pendidikan, pekerjaan, partisipasi politik dan publik, kegiatan rekreasi, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang mampu meningkatkan kualitas hidup mereka (Canada G. A., 2017). Hal tersebut sejalan dengan prinsip feminisme yang menuntut keadilan bagi perempuan dan anak (McAfee & Noëlle, 2018) sebab bukan hanya laki-laki yang berhak memperolehnya, tetapi mereka juga berhak atas kesejahteraan dan keadilan sosial. Area aksi terakhir, yang keenam berfokus pada pencapaian perdamaian dan keamanan (Canada G. A., 2017) yang tentu saja sejalan dengan tujuan feminisme yang hendak mewujudkan keadilan sosial, serta menyediakan berbagai perspektif dalam menyelesaikan isu-isu sosial, budaya, ekonomi, dan politik (McAfee & Noëlle, 2018).

B. Prinsip 3R (*Women's Rights, Resources, and Representation*)

Pengimplementasian kebijakan *Feminist International Assistance Policy* (FIAP), terdapat pengadopsian beberapa prinsip dasar 3R kebijakan luar negeri feminis Swedia. Hal ini merupakan sisi global dari kebijakan *Feminist International Assistance Policy* (FIAP) sebab kebijakan luar negeri feminis Swedia telah menjadi *blueprint* atau rancangan dasar dan diadopsi oleh berbagai negara lain di dunia (Angelita, 2023). Hal tersebut juga dapat berarti bahwa Kanada mengikuti tren atau fenomena global dengan ikut mengadopsi prinsip 3R milik kebijakan luar negeri feminis Swedia dan menuangkannya ke dalam seluruh area aksi kebijakan *Feminist International Assistance Policy* (FIAP).

Rancangan kebijakan luar negeri feminis Swedia memiliki pendekatan 3R yaitu menuntut; Hak perempuan (*Women's Rights*), yang didukung dengan sumber daya (*Resources*), demi meningkatkan tingkat perwakilan perempuan (*Women's Representation*) (ICRW, 2021). Area aksi kebijakan *Feminist International Assistance Policy* (FIAP) yang pertama bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender dan meningkatkan kualitas hidup perempuan (Canada G. A., 2017), dengan cara; (1) Memberikan dukungan untuk organisasi dan gerakan perempuan lokal di berbagai negara yang berusaha memajukan hak-hak perempuan, (2) Membantu pemerintah di negara-negara berkembang dalam mengatasi perbedaan kebutuhan perempuan dan laki-laki lewat perancangan kebijakan dan layanan, (3) Berkomitmen dalam pengambilan keputusan yang berbasis bukti, dan (4) Mengatasi tingginya tingkat kekerasan seksual dan berbasis gender yang dialami oleh perempuan dan anak perempuan (Canada).

Hal tersebut selaras dengan prinsip hak perempuan atau *Women's Rights*, dan dukungan sumber daya bagi perempuan (*Women's Resources*), sebab perempuan berhak merasakan kesetaraan gender dan memiliki kualitas hidup yang baik. Pada area aksi yang kedua, yaitu martabat manusia, Kanada berusaha untuk menegakkan martabat perempuan dengan memberikan bantuan kemanusiaan di area-area dan negara-negara yang miskin dan terdampak konflik dengan menyediakan layanan kesehatan, perawatan seksual dan reproduksi, serta air minum, makanan bergizi dan pendidikan yang berkualitas (Canada G. A., 2017). Hal tersebut juga sesuai dengan prinsip hak perempuan atau *Women's Rights*, karena perempuan juga berhak memiliki kehormatan dan martabat sebagai insan manusia. Dalam area aksi ketiga yang menekankan pada pertumbuhan yang merata (Canada G. A., 2017), Kanada berupaya untuk mendukung perempuan dalam mengembangkan keterampilan mereka, mendorong partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan pembangunan ekonomi, serta mengadakan pelatihan teknis, kejuruan dan kewirausahaan bagi perempuan (Canada G. A., 2017). Lewat area aksi ini, Kanada juga mempromosikan

inklusi sosial, hak tenaga kerja, hak untuk memiliki properti dan akses pembiayaan bagi perempuan (Canada G. A., 2017).

Area aksi ketiga ini sejalan dengan prinsip hak perempuan atau *Women's Rights* dan perwakilan perempuan atau *Women's Representation*, karena perempuan berhak atas inklusi sosial serta partisipasi dalam pengambilan keputusan dan pembangunan berbagai bidang kehidupan. Dalam area aksi keempat yang berfokus pada lingkungan dan aksi iklim, Kanada secara garis besar berusaha untuk memberikan akses yang layak bagi perempuan atas air, tanaman sebagai sumber makanan, dan sumber daya alam lainnya (Canada G. A., 2017). Kanada juga berusaha untuk mendorong partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di bidang lingkungan dan di sektor energi terbarukan (Canada G. A., 2017). Area aksi ini selaras dengan seluruh prinsip 3R (*Women's Rights, Resources, and Representation*) sebab perempuan berhak atas terbuka lebarnya akses akan sumber daya alam dan partisipasi dalam pengambilan keputusan yang menentukan kelestarian lingkungan.

Dalam area aksi yang kelima, yaitu pemerintahan inklusif, Kanada berusaha untuk mewujudkan; (1) Pemerintahan inklusif di seluruh dunia dengan mendorong kepemimpinan dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh perempuan dalam seluruh tingkat tata kelola dan manajemen sektor publik, (2) Sistem hukum yang kuat dan mempromosikan reformasi yang menghilangkan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, (3) Akses terhadap keadilan bagi perempuan yang terbuka lebar, (4) Perlindungan perempuan-perempuan aktivis pembela hak asasi manusia, dan (5) Naiknya kapasitas pemerintah di semua tingkatan dalam memastikan layanan publik yang responsif dan peka terhadap kebutuhan dan potensi perempuan (Canada). Area aksi kelima ini juga selaras terhadap prinsip hak perempuan atau *Women's Rights* dan perwakilan perempuan atau *Women's Representation*, sebab perempuan di seluruh dunia berhak atas akses yang sama lebarnya dengan laki-laki untuk berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang inklusif. Perdamaian dan keamanan, yang merupakan area aksi keenam kebijakan *Feminist International Assistance Policy* (FIAP), Kanada berupaya untuk; (1) Mendukung partisipasi penting perempuan dan organisasi-organisasi pembela hak perempuan dalam negosiasi perdamaian dan upaya pencegahan konflik, (2) Membantu memajukan hak-hak perempuan dalam proses pembangunan negara pasca-konflik, serta (3) Mencegah dan mengatasi kekerasan seksual di zona konflik dan menegakkan kebijakan tanpa toleransi terhadap pelecehan perempuan yang dilakukan oleh penjaga perdamaian (Canada).

Tabel 1

Rincian Adopsi Prinsip 3R (Women's Rights, Resources, and Representation) Dalam Setiap Area Aksi Kebijakan Feminist International Assistance Policy (FIAP)

Area Aksi Kebijakan <i>Feminist International Assistance Policy</i>	Pengadopsian prinsip 3R (<i>Women's Rights, Resources, and Representation</i>)
1. Kesetaraan Gender, dan Pemberdayaan Wanita	<i>Women's Rights</i> dan <i>Women's Resources</i>
2. Martabat Manusia	<i>Women's Rights</i>
3. Pertumbuhan Merata	<i>Women's Rights</i> dan <i>Women's Representation</i>
4. Aksi Lingkungan dan Iklim	<i>Women's Rights, Resources, dan Representation</i>
5. Pemerintahan Inklusif	<i>Women's Rights</i> dan <i>Women's Representation</i>
6. Perdamaian dan Keamanan	<i>Women's Rights</i> dan <i>Women's Representation</i>

Sisi Lokal dari Kebijakan *Feminist International Assistance Policy* (FIAP)

A. Fokus Kebijakan *Feminist International Assistance Policy* (FIAP)

Tidak seperti kebijakan luar negeri feminis Swedia yang bersifat disruptif dan radikal karena secara tegas dan keras ingin menghapuskan patriarki di seluruh dunia, kebijakan *Feminist International Assistance Policy* (FIAP) Kanada memiliki pendekatan yang lebih tradisional dalam mewujudkan kesetaraan gender dengan secara garis besar, memastikan ketercapaian pembangunan bidang ekonomi dan keamanan. Maka dari itu, berbeda dengan Swedia yang menerapkan secara penuh kebijakan luar negeri feminisnya dalam seluruh bidang, mulai dari diplomasi dan bidang pembangunan, hingga bidang perdagangan dan pertahanan untuk mengatur hubungan bilateralnya dengan negara lain, sedangkan Kanada hanya berfokus untuk memajukan feminisme dalam kebijakan luar negerinya di bidang bantuan internasional (Women, 2021).

Sisi lokal dan unik dari kebijakan *Feminist International Assistance Policy* (FIAP) yang hanya berfokus di bidang bantuan internasional tersebut bersifat transformatif dan membuat Kanada berada di posisi terdepan dan terkemuka dalam mengerahkan banyak sumber daya ke organisasi hak-hak perempuan dan gerakan feminis di seluruh dunia (Women, 2021). Misalnya, Kanada menganggarkan Dana Kesetaraan pada Juni 2019, untuk mendukung kesetaraan gender dan kaum feminis independen, sebesar CAD\$300 juta (Women, 2021). Untuk merealisasikan dan mendukung ketercapaian area aksi pertama, Kanada juga telah mendedikasikan sebesar CAD\$150 juta selama lima tahun, yaitu dari tahun 2017 hingga 2022, untuk mendukung organisasi dan gerakan perempuan lokal dalam memajukan hak-hak perempuan di negara berkembang (Canada), yang kemudian dikenal dengan Program Suara dan Kepemimpinan Perempuan. Terhitung di bulan November tahun 2020, Kanada telah mengeluarkan sebanyak CAD\$182 juta untuk Program Suara dan Kepemimpinan Perempuan yang telah mendukung 32 proyek di 30 negara dan wilayah (Women, 2021). Di tahun 2021, Kanada memberikan proporsi sebesar 92% persen dari keseluruhan bantuan luar negerinya untuk difokuskan kepada pengarusutamaan gender (*gender-focused aid*), mengalahkan Swedia dengan kebijakan luar negeri feminisnya (Women, 2021). Inisiatif-inisiatif luar biasa dan unik tersebutlah yang membuat Kanada mendapat tepuk tangan atau penghargaan dari masyarakat sipil feminis dari berbagai belahan dunia dan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan *Feminist International Assistance Policy* (FIAP) menjanjikan dan target pendanaan pemerintah Kanada memiliki akuntabilitas yang tinggi (Women, 2021).

B. Aspek Lingkungan Kebijakan *Feminist International Assistance Policy* (FIAP)

Kerangka kebijakan luar negeri feminis Swedia mencakup tiga area utama, yaitu; (1) Kebijakan keamanan asing dan nasional, (2) Kerjasama pembangunan, dan (3) Kebijakan perdagangan dan promosi (Women, 2021). Berbeda dengan Swedia dan kebijakan luar negeri feminisnya yang tidak mencantumkan sama sekali aspek lingkungan di dalamnya, kebijakan *Feminist International Assistance Policy* (FIAP) milik Kanada menunjukkan bahwa selain peduli terhadap perempuan, dan kesetaraan gender, Kanada juga peduli terhadap lingkungan dan menyadari bahwa fenomena perubahan iklim juga mempengaruhi ketahanan dan kualitas hidup perempuan. Kepedulian tersebut tercermin dari area aksi keempat kebijakan *Feminist International Assistance Policy* (FIAP), yaitu aksi lingkungan dan iklim (Canada).

Perancangan area aksi keempat kebijakan *Feminist International Assistance Policy* (FIAP) secara umum menunjukkan komitmen Kanada dalam; (1) Meringankan beban perempuan lewat pelestarian lingkungan dan aksi iklim, (2) Membantu masyarakat di berbagai negara yang rentan dan harus beradaptasi dengan perubahan iklim, (3) Memitigasi dampak perubahan iklim, (4) Memanfaatkan investasi sektor swasta, dan (5) Memfasilitasi transisi menuju ekonomi rendah karbon. Masyarakat di seluruh dunia, terutama di daerah miskin dan rentan, sedang mengalami dampak tidak stabil dari perubahan iklim yang dramatis dan ekstrim. Perubahan iklim menimbulkan munculnya berbagai macam permasalahan, seperti; naiknya permukaan laut, banjir, gelombang panas atau cuaca panas yang sangat ekstrim, kekeringan, kelangkaan air dan penyebaran penyakit tropis, misalnya penyakit yang ditularkan oleh satu organisme hidup ke organisme lain, seperti melalui gigitan nyamuk. Wanita dan anak perempuan sangat rentan dan berisiko tinggi terdampak masalah-masalah perubahan iklim tersebut. Faktanya; (1) Dalam satu hari, 25 negara sub-Sahara di Afrika, wanita harus menghabiskan total 16 juta jam hanya untuk mengumpulkan air untuk keluarga mereka, (2) Anak perempuan di rumah tangga yang memasak dengan bahan bakar yang menghasilkan polusi karbon (termasuk kayu, kotoran hewan, dan arang kayu) menghabiskan rata-rata 18 jam seminggu untuk mengumpulkan bahan bakar, tidak seperti mereka yang menggunakan bahan bakar bersih, seperti seperti biogas, etanol atau listrik yang dihasilkan dari energi terbarukan seperti angin dan matahari yang hanya menghabiskan lima jam seminggu untuk mengumpulkan bahan-bahan memasak tersebut, (3) Jika tidak ada tindakan atau langkah apapun yang dilakukan dalam mencegah dan mengatasi perubahan iklim, 100 juta orang akan jatuh miskin pada tahun 2030, dan (4) Kelambanan dalam mencegah dan mengatasi perubahan iklim akan memiliki efek ekonomi kumulatif berupa potensi kerugian kumulatif dalam PDB global yang diperkirakan mencapai \$72 triliun pada tahun 2060. Masalah-masalah dan fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa tidak hanya perubahan iklim berbahaya dan merugikan, tetapi penderitaan perempuan, terutama perempuan yang tinggal di daerah miskin dan rentan akan perubahan iklim, karena mereka dituntut untuk menjadi produsen utama dalam memasak makanan dan menyediakan air, pemanas, dan bahan bakar memasak dalam rumah tangga. Hal tersebut menyebabkan mereka tidak memiliki banyak waktu untuk beraktivitas dan berpartisipasi di bidang pendidikan, pekerjaan, politik dan publik, rekreasi, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang mampu meningkatkan kualitas hidup mereka (Canada).

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, Kanada berusaha untuk menyediakan akses yang lebih baik terhadap sumber daya dan teknologi tahan iklim bagi perempuan dan anak perempuan dengan cara menyusun perencanaan, pembuatan kebijakan, dan pendanaan bagi pemerintah negara-negara miskin dan berkembang untuk mengatasi perubahan iklim yang mempengaruhi kualitas hidup perempuan. Kanada juga berusaha untuk memberikan kesempatan kerja dan berbisnis bagi perempuan di sektor energi terbarukan. Demi memastikan partisipasi perempuan, Kanada mendorong kepemimpinan dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh perempuan dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pembangunan ketahanan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Salah satu contoh aksi nyata yang telah dilakukan oleh Kanada dalam mewujudkan ketercapaian area aksi pertama kebijakan *Feminist International Assistance Policy* (FIAP) adalah implementasi Proyek Pengadaan Fasilitas Adaptasi Perubahan Iklim antara Kanada dan UNDP (*United Nations Development Programme*) di Kamboja. Kamboja adalah negara yang terdampak oleh perubahan iklim dibuktikan dengan adanya kelangkaan air, kekeringan, dan konflik antara laki-laki dan perempuan karena adanya ketimpangan

akses akan air di negara tersebut. Pelaksanaan dan pembiayaan program Proyek Pengadaan Fasilitas Adaptasi Perubahan Iklim Kanada dan UNDP dimulai di tahun 2009 yang telah membuahkan hasil baik bagi masyarakat Kamboja dalam sistem pengelolaan air dengan lebih baik. Terdapat pemasangan bak penampungan dan kolam di lebih dari 3.400 rumah tangga di 65 desa yang dapat menampung air hujan dan mengatasi kekurangan air di musim kemarau. Program tersebut juga memberikan pelatihan bidang pertanian yang tahan akan perubahan iklim bagi para perempuan sehingga mereka dapat memulai menanam sayur dan beberapa macam tumbuhan lainnya untuk meningkatkan kesehatan dan ketahanan pangan di setiap rumah tangga dan hasilnya juga dapat dijual untuk meningkatkan pendapatan dan perekonomian mereka. Kanada dan UNDP juga bermitra dengan Kementerian Urusan Wanita Kamboja untuk memastikan pemerataan akses dan pembagian air antara laki-laki dan perempuan, serta memberikan pelatihan bagi perempuan dalam pengelolaan sumber daya. Dengan adanya keterampilan berkebun dan kemampuan menjual hasil berkebun, serta mengelola sumber daya yang dimiliki oleh perempuan, mereka menjadi lebih dihormati dan disegani di lingkungan pedesaan dan keluarga mereka (Canada).

C. Pencapaian Proyek Pembangunan Berkelanjutan PBB

Berbeda dengan Swedia dan kebijakan luar negeri feminisnya, lewat kebijakan *Feminist International Assistance Policy* (FIAP), pemerintah Kanada secara umum berkomitmen untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan dalam berbagai bidang kehidupan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan serta meningkatkan kesejahteraan, serta secara spesifik berusaha untuk mencapai seluruh target dalam Proyek Pembangunan Berkelanjutan PBB (*The Sustainable Development Goals/SDGs*) (Pemerintah Kanada dikutip dalam Women, 2021). Adapun dalam implementasi area aksi pertama, yaitu kesetaraan gender, dan pemberdayaan wanita tentu saja berusaha untuk mencapai target kelima Proyek Pembangunan Berkelanjutan PBB (*SDG 5. Gender Equality*) (Canada G. A., 2017). Salah satu tujuan dari perancangan are aksi pertama adalah karena adanya keinginan Kanada untuk membantu mengatasi kekerasan seksual dan berbasis gender di dunia, yang merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling sering terjadi dan mengerikan, melalui advokasi dan investasi dari pemerintah Kanada (Canada). Tujuan tersebut selaras dengan beberapa tujuan target kelima Proyek Pembangunan Berkelanjutan PBB (*SDG 5. Gender Equality*), yaitu; (1) Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan dimanapun itu, (2) Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap semua perempuan dan anak perempuan di ruang publik dan privat, serta menghentikan aktivitas perdagangan dan eksploitasi seksual dan jenis eksploitasi lainnya, dan (3) Mengeliminasi praktik pernikahan anak, pemaksaan pernikahan dini dan mutilasi alat kelamin perempuan (Programme).

Pelaksanaan area aksi kedua, yaitu martabat manusia, mendukung pencapaian target kedua, ketiga, dan keempat Proyek Pembangunan Berkelanjutan PBB (*SDG 2. Zero hunger, SDG 3. Good health and well-being, dan SDG 4. Quality Education*) sebab Kanada ingin menegakkan martabat manusia di seluruh kawasan di dunia, khususnya di negara-negara miskin dan terdampak konflik dan bencana alam dengan menyediakan bantuan kemanusiaan darurat dan pembangunan yang berfokus pada penyediaan fasilitas kesehatan, air minum, makanan bergizi dan pendidikan yang berkualitas (Canada G. A., 2017). Penerapan area aksi ketiga, yaitu pertumbuhan bagi semua orang, mendorong pencapaian target kedelapan dan kesepuluh Proyek Pembangunan Berkelanjutan PBB (*SDG 8. Decent Work and Economic Growth dan SDG 10. Reduced Inequalities*) karena pertumbuhan yang merata dapat menumbuhkan perekonomian, mengurangi ketimpangan, dan memberikan

kesempatan partisipasi yang setara bagi perempuan untuk bekerja secara layak dan menjadi aktor ekonomi (Canada G. A., 2017). Implementasi area aksi keempat, yaitu lingkungan dan aksi iklim, berupaya untuk mencapai target keenam dan ketiga belas Proyek Pembangunan Berkelanjutan PBB (*SDG 6. Clean Water and Sanitation* dan *SDG 13. Climate Action*) karena berfokus pada adaptasi, mitigasi, pengelolaan sanitasi dan sumber daya air (Canada G. A., 2017). Pelaksanaan area aksi kelima, yaitu pemerintahan inklusif, dan area aksi keenam, yaitu perdamaian dan keamanan, bertujuan untuk mencapai target keenam belas Proyek Pembangunan Berkelanjutan PBB (*SDG 16. Peace, Justice, and Strong Institutions*) karena Kanada mendukung pemerintahan inklusif yang adil, demokratis, dan memberikan keseimbangan hak-hak perempuan dalam partisipasi politik, serta mendorong pentingnya peran perempuan dalam menegakkan keamanan dan perdamaian, misalnya dalam proses *peacebuilding, peacemaking dan peacekeeping* (Canada G. A., 2017).

Tabel 2

Rincian Target Proyek Pembangunan Berkelanjutan PBB (The Sustainable Development Goals/SDGs) yang Ingin Dicapai Dalam Setiap Area Aksi Kebijakan Feminist International Assistance Policy (FIAP)

Area Aksi Kebijakan <i>Feminist International Assistance Policy</i>	Target Berkelanjutan PBB (<i>The Sustainable Development Goals/SDGs</i>)	Pencapaian Proyek Pembangunan
1. Kesetaraan Gender, dan Pemberdayaan Wanita	<i>SDG 5. Gender Equality</i>	
2. Martabat Manusia	<i>SDG 2. Zero hunger, SDG 3. Good health and well-being, dan SDG 4. Quality Education</i>	  
3. Pertumbuhan Merata	<i>SDG 8. Decent Work and Economic Growth dan SDG 10. Reduced Inequalities</i>	 
4. Aksi Lingkungan dan Iklim	<i>SDG 6. Clean Water and Sanitation dan SDG 13. Climate Action</i>	 
5. Pemerintahan Inklusif	<i>SDG 16. Peace, Justice, and Strong Institutions</i>	
6. Perdamaian dan Keamanan	<i>SDG 16. Peace, Justice, and Strong Institutions</i>	

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi kebijakan *Feminist International Assistance Policy* (FIAP), terdapat fenomena glokalisasi. Hal tersebut dapat dibuktikan dari dua sisi, yaitu sisi global dan sisi lokal yang dimiliki oleh kebijakan *Feminist International Assistance Policy* (FIAP). Sisi global kebijakan *Feminist International Assistance Policy* (FIAP) mengacu pada hadirnya nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dianut oleh masyarakat internasional. Nilai-nilai tersebut adalah feminisme karena telah dianut oleh kaum-kaum dan negara-negara feminis di dunia dan prinsip-prinsip 3R (*Women's Rights, Resources, and Representation*) kebijakan luar negeri feminis Swedia karena telah menjadi *blueprint* atau fondasi yang mendasari pengadopsian dan perancangan kebijakan-kebijakan luar negeri yang feminis dari berbagai negara di dunia seperti salah satunya, Kanada. Sisi lokal dari kebijakan *Feminist International Assistance Policy* (FIAP) merujuk pada keunikan yang membedakan kebijakan *Feminist International Assistance Policy* (FIAP) dengan kebijakan-kebijakan luar negeri feminis negara-negara lainnya. Sisi lokal kebijakan *Feminist International Assistance Policy* (FIAP) tercermin dari; (1) Fokus kebijakan *Feminist International Assistance Policy* (FIAP) yang hanya menekankan pada bidang bantuan internasional dan bersifat transformatif, tidak seperti kebijakan luar negeri feminis Swedia yang bersifat radikal dan disruptif, (2) Aspek lingkungan yang masuk dalam elemen kebijakan *Feminist International Assistance Policy* (FIAP) yang tercermin dari adanya area aksi keempat, yaitu aksi lingkungan dan iklim, dan (3) Setiap area aksi kebijakan *Feminist International Assistance Policy* (FIAP) secara khusus berusaha untuk mencapai target-target Proyek Pembangunan Berkelanjutan PBB (*The Sustainable Development Goals/SDGs*).

Mengacu pada hasil penelitian, penulis menyarankan beberapa hal, antara lain; (1) Pengadaan penelitian lanjutan dari penelitian mengenai motivasi dan alasan Kanada menerapkan glokalisasi dalam implementasi kebijakan *Feminist International Assistance Policy* (FIAP), (2) Pengadaan penelitian berikutnya untuk mengetahui apakah ada kepentingan nasional yang ingin dicapai oleh Kanada lewat penerapan kebijakan *Feminist International Assistance Policy* (FIAP) untuk mengatur hubungan dan interaksi politiknya dengan negara lain, serta (3) Pengadaan penelitian selanjutnya yang lebih komprehensif dan spesifik dalam meninjau performa penerapan kebijakan *Feminist International Assistance Policy* (FIAP) secara umum, maupun secara spesifik ketika diterapkan oleh Kanada di suatu negara.

5. Daftar Pustaka

- Affairs, F. M. of F. (2022, October 27). *What does feminist foreign policy mean?* Ministry for Foreign Affairs. Retrieved January 8, 2023, from https://um.fi/current-affairs/-/asset_publisher/gc654PySnjTX/content/mita-on-feministinen-ulkopolitiikka-/35732
- Angelita, E. (2023). RINGKASAN LINIMASA SEJARAH KEBIJAKAN LUAR NEGERI FEMINIS. Retrieved 2023, from https://www.canva.com/design/DAFXFL_jxV0/GDi4kP9NQdyYnE64K9EcpA/edit#
- Canada, G. (2018.). *Canada's Feminist International Assistance Policy*. Retrieved February 11, 2023, from https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/priorities-priorites/policy-politique.aspx?lang=eng#5.4
- Canada, G. A. (2017). *Canada's Feminist International Assistance Policy*. Retrieved February 23, 2023, from <https://www.international.gc.ca/world-monde/assets/pdfs/iap2-eng.pdf>

- Day, L. (2016, February 18). *What is feminism? What Is Feminism?* | Women & Gender Studies. Retrieved January 9, 2023, from <https://wgs.eku.edu/what-feminism-0>
- Government, N. (2022, December 7). Feminist foreign policy explained. Retrieved January 9, 2023, from <https://www.government.nl/latest/news/2022/11/18/feminist-foreign-policy-netherlands>
- Khondker, H. H. (2005, December). Globalisation to glocalisation: A conceptual exploration. Retrieved January 9, 2023, from https://www.researchgate.net/publication/277171100_Globalisation_to_Glocalisation_A_Conceptual_Exploration
- McAfee, & Noëlle. (2018). *Feminist philosophy*. Stanford Encyclopedia of Philosophy. Retrieved January 9, 2023, from <https://plato.stanford.edu/entries/feminist-philosophy/>
- Morton, S. E., Muchiri, J., & Swiss, L. (2020, September). *Which feminism(s)? for whom? Intersectionality in Canada's Feminist International Assistance Policy*. International journal (Toronto, Ont.). Retrieved February 11, 2023, from <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7586002/>
- Motoyama, H. (2022). Has Japanese Foreign Policy Become Feminist Too? An Analysis of the “Women Shine” Foreign Policy of the Second Abe Administration. Retrieved January 8, 2023, from https://www.jstage.jst.go.jp/article/asiajapan/4/0/4_1/pdf
- Nurhayati, C. (n.d.). *Teori Perubahan Sosial*. Globalisasi dan Glokalisasi. Retrieved February 12, 2023, from <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/54434/1/Globalisasi%20dan%20Glokalisasi.pdf>
- Organization, P. A. H. (n.d.). *Canada's Feminist International Assistance Policy*. PAHO/WHO | Pan American Health Organization. Retrieved February 11, 2023, from <https://www.paho.org/en/canada/canadas-feminist-international-assistance-policy>
- Parekh, S., & Wilcox, S. (2020, March 12). *Feminist Perspectives on Globalization*. Stanford Encyclopedia of Philosophy. Retrieved March 18, 2023, from <https://plato.stanford.edu/entries/feminism-globalization/>
- Policy, C. for F. F. (n.d.). *Feminist foreign policy*. Feminist Foreign Policy. Retrieved January 8, 2023, from <https://centreforfeministforeignpolicy.org/feminist-foreign-policy>
- Programme, U. N. D. (n.d.). *Sustainable development goals*. UNDP. Retrieved February 12, 2023, from <https://www.undp.org/sustainable-development-goals>
- Women, I. C. for R. on. (2021). Defining feminist foreign policy: A 2021 Update - icrw. Retrieved February 11, 2023, from https://www.icrw.org/wp-content/uploads/2021/10/FFP-2021Update_v3.pdf
- Women, I. C. for R. on. (2021). Defining feminist foreign policy: A 2021 Update - icrw. Retrieved January 8, 2023, from <https://www.icrw.org/wp-content/uploads/2021/09/Defining-Feminist-Foreign-Policy-2021-Update.pdf>
- Women, T. U. N. (2022). Feminist foreign policies: An introduction. Retrieved January 8, 2023, from <https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-09/Brief-Feminist-foreign-policies-en.pdf>